

Potensi Zakat Sebagai Katalisator Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan SDGS

The Potential Of Zakat As A Catalyst For Achieving Sustainable Development Goals (SDGS)

Fatikhah Ghofi Nabila^{a*}, Achmad Room Fitrianto^b

Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{a,b}

*afatikhahghofinabila@gmail.com, ^bar.fitrianto@uinsby.ac.id

Abstract

Economic growth in Indonesia remains robust amidst global economic challenges. In the third quarter of 2023, Gross Domestic Product (GDP) recorded steady growth, with various sectors contributing to job creation. Data from the Central Bureau of Statistics (BPS) shows that Indonesia's economy grew by 4.94% in the third quarter of 2023 compared to the same period in 2022, which also impacted the growth of zakat. Zakat contributes significantly to the macroeconomy by helping people and supporting the economy in general. Studies show that the effect of zakat on macroeconomy is significant zakat strives for macroeconomic stability. This paper examines the potential of zakat in financing the achievement of sustainable development SDGs. This study covers the last 5 years of zakat management in the community especially on poverty alleviation and economic growth by continuing to improve human resources and continue to provide direction to reduce economic disparities. This research further explores the distribution of zakat in order to achieve sustainable development goals in aspects of SDG 1, namely no poverty and SDG 8, namely decent work and economic growth. The poverty rate in Indonesia in 2022 has decreased by 60% when compared to 2021, it also has an impact on the growth of zakat in Indonesia from 2020 to 2022 has a growth of 80.00%.

Keywords: Zakat Potential, SDGs, Economic Growth.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global. Pada kuartal ketiga tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat pertumbuhan yang stabil, dengan berbagai sektor berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yang juga berdampak pada pertumbuhan zakat. Zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian makro dengan membantu masyarakat dan mendukung perekonomian secara umum. Studi menunjukkan bahwa pengaruh zakat terhadap perekonomian makro sangat signifikan karena zakat berupaya untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Makalah ini mengkaji potensi zakat dalam membiayai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi ini mencakup 5 tahun terakhir pengelolaan zakat di masyarakat khususnya pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dengan terus meningkatkan sumber daya manusia dan terus memberikan arahan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut distribusi zakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam aspek SDG 1, yaitu pengentasan kemiskinan dan SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 telah menurun sebesar 60% dibandingkan tahun 2021, hal ini juga berdampak pada pertumbuhan zakat di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 80,00%.

Kata Kunci: Potensi Zakat, SDGs, Pertumbuhan Ekonomi.

1. Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan perpanjangan dari program Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Tujuan dari peluncuran SDGs adalah untuk mempertahankan kemajuan yang telah

dicapai oleh delapan program MDGs dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Pengentasan kemiskinan, yang merupakan isu multidimensi, merupakan salah satu tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk menyediakan data statistik yang digunakan pemerintah untuk mengimplementasikan inisiatif pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Di antara 193 kepala negara yang telah berkomitmen untuk mendukung inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk memajukan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesetaraan dan hak asasi manusia, merupakan titik penting dalam sejarah global. Ke-169 tujuan dan 17 sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diperkirakan akan tercapai pada tahun 2030. Untuk menjamin tidak ada yang tertinggal, tujuan-tujuan tersebut menggunakan konsep universal, terintegrasi, dan inklusif (Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, setiap daerah diwajibkan untuk mulai melaksanakan program SDGs untuk mencapai target pada tahun 2030 dan melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Implementasi tujuan pembangunan global dalam pembangunan nasional dan regional dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Sebagai hasilnya, pemerintah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah daerah dapat berinovasi melalui layanan publik dan kebijakan lainnya karena mereka memiliki sumber daya dan kekuasaan untuk melakukannya (Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2018). Tentu saja, stabilitas ekonomi diperlukan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs. Perekonomian Indonesia, yang terus tumbuh sejak pandemi, ditunjukkan oleh grafik berikut yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 1. Grafik laju pertumbuhan ekonomi 2019-2023

Sumber: (BPS, 2023)

Dengan menggunakan dana zakat, zakat juga menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka yang berhak menerimanya akan mendapatkan stimulasi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka di kedua sisi tersebut (Riyadi, 2019). Ini adalah opsi tambahan untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan, di mana para pemangku kepentingan menilai seberapa baik sumber pembiayaan dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, kontribusi zakat terhadap SDGs pada dasarnya merupakan proses yang tidak sederhana yang melibatkan beberapa komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kompetisi untuk generasi mendatang. Ini adalah proses pembangunan di seluruh dunia yang diberlakukan pada perusahaan, ekonomi, tanah, dan kota (Hadi, 2021)

Di Indonesia, terdapat potensi zakat yang sangat besar-sekitar Rp 327 triliun per tahun. Jumlah potensi ini hampir menyamai pengeluaran pemerintah sebesar Rp 431,5 triliun untuk jaminan sosial pada tahun 2022. Menurut Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, potensi zakat di Indonesia masih sangat besar. Selain itu, saat ini terdapat 10.124 amil, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Amil Zakat, dan 512 Badan Amil Zakat yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Waryono mengatakan, "Dengan sumber daya yang besar ini, saya memiliki keyakinan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia akan terus meningkat," pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, dalam sambutannya pada acara Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Lazis Assalam Fil Alamin di Jakarta.

Dari potensi zakat yang terus mengalami kenaikan pertahunnya membuat banyak kegiatan dikelola oleh lembaga-lembaga penyalur zakat seperti pelatihan kerja, pendanaan usaha, memberikan lapangan kerja baru serta regulasi bagi pihak penerima bantuan (Khorunisa & Prasajo, 2020). Pada artikel ini penulis akan membahas mengenai pengurangan angka kemiskinan sebagai pencapaian salah satu poin dalam SDGs, pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan dan tercapai aspek SDG 8 yang di dukung oleh lembaga zakat dalam salah satu upaya membantu pemerintah meningkatkan ekonomi regional (Natalia & Maulidya, 2023).

2. Landasan Teori

Pertumbuhan Zakat di Indonesia

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan zakat menyoroti bagaimana zakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kemajuan ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengumpulkan lebih banyak pendapatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan zakat di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kemakmuran ekonomi negara.

Pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diyakini memiliki dampak negatif dan substansial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan hubungan antara zakat dan pengurangan kemiskinan. Dengan kata lain, penurunan angka kemiskinan berkorelasi dengan peningkatan jumlah ZIS yang dikumpulkan dan disalurkan. Dengan kata lain, zakat sangat penting dalam upaya Indonesia untuk mengurangi kemiskinan (Ali et al., 2016).

Hubungan antara zakat dan ketimpangan pendapatan. Meskipun penyaluran zakat yang diprosikan melalui Indeks Kesejahteraan BAZNAS dinilai tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia, namun penelitian ini menyarankan agar pengelola zakat membuat dan mengembangkan program-program zakat yang dapat membantu pemberdayaan ekonomi penerima zakat (mustahik). Hal ini bertujuan agar berpotensi mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat (Lutfi, 2023).

Dalam penghimpunan zakat di Indonesia, menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan dana zakat masih belum optimal dan belum mencapai potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat agar lebih sesuai dengan potensinya dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat (Afif & Oktiadi, 2018).

Dengan demikian, pertumbuhan zakat di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi penghimpunan zakat. Zakat juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran Zakat Dalam SDGs

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu serangkaian tujuh belas tujuan global yang dirancang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi hal-hal berikut ini: SDG 1: tidak ada kemiskinan; SDG 2: tidak ada kelaparan; SDG 3: kesehatan yang baik dan kesejahteraan; SDG 4: pendidikan yang berkualitas; SDG 5: kesetaraan gender; SDG 6: air bersih dan sanitasi; SDG 7: energi yang terjangkau dan bersih; SDG 8: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; SDG 9: industri, inovasi, dan infrastruktur; SDG 10: mengurangi ketidaksetaraan; SDG 11: kota dan permukiman berkelanjutan; SDG 12: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; SDG 13: aksi terhadap iklim; SDG 14: kehidupan di bawah air; SDG 15: kehidupan di daratan; SDG 16: perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat; dan SDG 17: kemitraan untuk mencapai tujuan. Dua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ada saat ini - SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan dan SDG 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi - merupakan topik utama penelitian ini dari total 17 tujuan yang ada (Nurfatimah et al., 2022).

Zakat, sebagai instrumen syariah, memainkan peran yang sangat strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sebagai sumber pendanaan alternatif, zakat menjadi solusi yang halal, adil, dan berkelanjutan. Melalui aliran dana zakat, sejumlah program dan inisiatif yang mendukung pencapaian SDGs dapat didanai dan dijalankan. Keterkaitan antara zakat dan tujuan SDGs terbentang dalam berbagai aspek. Zakat memiliki hubungan yang signifikan dengan sejumlah tujuan SDGs, antara lain pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang teroptimasi dan efisien dapat memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mempercepat pencapaian tujuan-tujuan ini (Bambang Hermantoro & Zuraidah, 2023).

Untuk mendukung pencapaian SDGs di berbagai negara, pengelolaan zakat dapat menjadi model tata kelola yang baik atau good governance. Sebagai mekanisme yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, pengelolaan zakat menunjukkan bagaimana arus dana dan sumber daya dapat dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang

paling efektif dan berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Hadi, 2021). Zakat memegang peran yang integral dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dengan pendistribusian kepada delapan asnaf, terutama kepada orang-orang yang miskin, zakat berjalan seiring dengan target penurunan proporsi penduduk miskin yang menjadi tujuan SDG ke-1 Keberadaan dan fungsi zakat secara langsung mendukung pencapaian target ini, menunjukkan bagaimana instrumen syariah ini dapat digunakan dalam strategi global untuk mengentaskan kemiskinan.

Terdapat program-program pendayagunaan zakat, seperti penyaluran modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pendampingan, dapat membantu penerima zakat (mustahik) yang produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dampak dari program ini membantu peningkatan ekonomi keluarga secara individu, mendukung upaya mengurangi kemiskinan ekstrem dan kerentanan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, strategi-strategi ini mendukung dan memajukan pelaksanaan tujuan SDG ke-1 (Jurnal & Islam, 2019).

Zakat memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu pertumbuhan usaha mikro melalui program-program produktif, termasuk pemberian modal usaha. Keterkaitan ini sejalan dengan target SDG ke-8 yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan lapangan kerja. Dalam konteks ini, zakat mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut (Bilek-Steindl & Url, 2022). Di samping itu, zakat juga berperan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahik dengan menyediakan pelatihan keterampilan kerja. Sebagai hasilnya, mustahik akan memiliki pekerjaan yang lebih layak dan produktif, yang mendukung capaian target SDG ke-8. Pencapaian target ini akan menjadi wujud nyata dari manfaat zakat dalam peningkatan kualitas kehidupan.

Seiring dengan pengelolaan zakat yang efektif, pertumbuhan sektor keuangan syariah dapat jadi kenyataan. Pertumbuhan ini, pada akhirnya, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara umum. Aspek ini memperlihatkan bagaimana zakat memainkan peran yang strategis dalam mencapai tujuan SDG ke-8. Menggali peran optimal zakat dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan memberi kontribusi signifikan terhadap percepatan pencapaian berbagai target SDGs. Melalui optimalisasi manajemen zakat, peran serta zakat dalam mencapai tujuan global ini dapat terwujud dan menghasilkan dampak yang lebih luas di masyarakat.

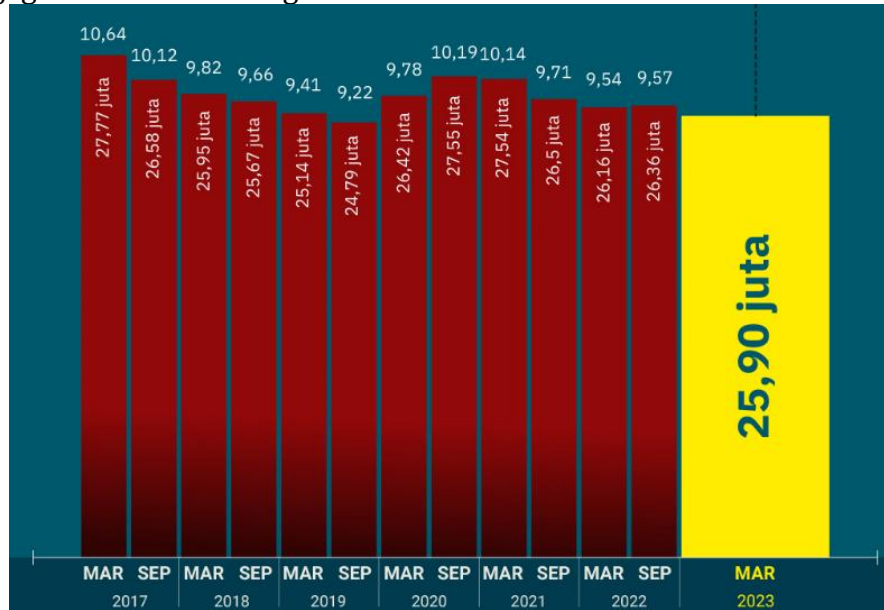
3. Metode

Pada artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literature review sebagai pengumpulan data untuk menunjang artikel ini. Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai SDGs dimana dalam pokok bahasan artikel ini memilih SDG 1 dan SDG 8 yang diulas secara lebih mendetail dan mendalam, akan tetapi dalam pencapaian dari SDG 1 dan SDG 8 tentunya perlu dukungan baik berupa materi dan nonmateri, oleh karena itu penulis meninjau keberhasilan SDG 1 dan SDG 8 yang ditinjau dari zakat dimana zakat memberikan sumbangsih yang besar atas ketercapaiannya tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs.

4. Hasil dan Pembahasan

Kemandirian harus ditingkatkan melalui pembangunan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah seperangkat tujuan program yang mencakup 17 tujuan

untuk pembangunan berkelanjutan dan 19 target terukur dengan jangka waktu 15 tahun atau 2030. SDGs adalah agenda pembangunan global yang berfokus pada kesejahteraan manusia yang menggantikan program sebelumnya, Millennium Development Goals (MDGs), yang dikukuhkan pada tanggal 25 September 2015 (Wahyudi, 2017). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau SDGs, adalah pembangunan yang menjamin keadilan, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, dan menjaga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup penerapan tata kelola yang dapat mempertahankan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi generasi mendatang.



Gambar 2. Grafik Jumlah Penduduk Miskin diIndonesia Maret 2017-Maret 2023

Sumber: (BPS,2023)

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang menurun 0,46 juta orang dibanding September 2022. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang, meski angka penurunan tidak banyak akan tetapi sangat signifikan turun jumlah kemiskinan yang ada sehingga dapat membantu ketercapaian dari fokus SDGs khususnya pada SDG 1.

Indikator untuk mengukur kemajuan terkait dengan SDG 1, tidak ada kemiskinan, mencakup berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas. Melalui pemantauan dan perbaikan pada indikator-indikator dalam mencapai tujuan SDG 1 untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan SDG 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk di seluruh dunia (Bambang Hermantoro & Zuraidah, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat terkait dengan SDG 1, yaitu Tidak Ada Kemiskinan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut SDG 1 seperti, produk domestik bruto (PDB): PDB merupakan ukuran nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan

oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan PDB yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan (Afwan & Andri, 2022).



Gambar 3. Grafik Perkembangan dan Jumlah Pengangguran 1958-Feb 2023

Sumber: (BPS, 2023)

Indeks pembangunan manusia (IPM), yang mencakup indikator-indikator seperti angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan per kapita, dapat memberikan gambaran umum mengenai kesejahteraan masyarakat dan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas hidup. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, mencerminkan ketersediaan pekerjaan yang layak dan dapat menjadi indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan: indikator ini mencerminkan jumlah penduduk yang diharapkan dengan memperhatikan metrik-metrik ini, upaya-upaya yang lebih efisien dapat dilakukan untuk mencapai TPB 1 dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sejumlah indikator SDG 8, termasuk Pekerjaan yang Layak dan Kemajuan Ekonomi, dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi Indonesia. Indonesia menggunakan sejumlah indikator penting dalam upaya mencapai tujuan Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Layak (SDG 8). Nilai pasar dari semua komoditas dan jasa yang dihasilkan negara ini pertama-tama ditentukan oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB yang positif dipandang sebagai tanda ekspansi ekonomi yang baik dan aktivitas ekonomi jangka panjang yang menguntungkan (Bilek-Steindl & Url, 2022).

Indikator penting dari ketersediaan lapangan kerja yang baik adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang. Kesan mengenai tingkat keamanan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja di berbagai sektor ekonomi dapat diperoleh dengan melihat proporsi pekerjaan tidak resmi di dalam angkatan kerja (Azzahro & Prakoso, 2022).



Gambar 4. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2023

Sumber: (International Monetary fund, 2022)

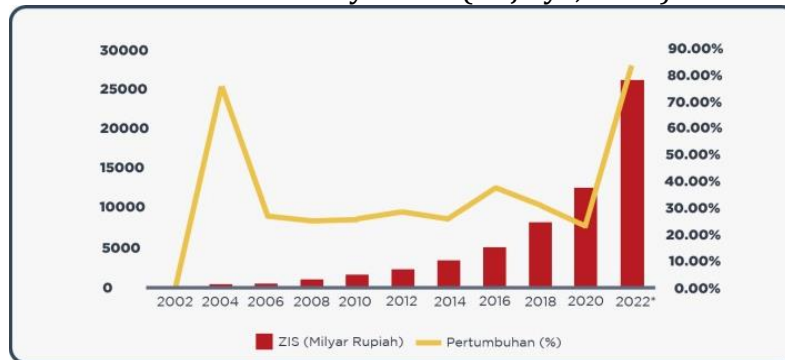
Sebagai reaksi atas perkiraan penurunan ekonomi dunia pada tahun 2023, IMF dan Bank Dunia sering kali menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan ini merupakan perpanjangan dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dimulai pada tahun 2022. ekspansi yang kuat di sektor industri, tingkat infrastruktur dan investasi sektor ekonomi yang prospektif, dan produktivitas pekerja yang lebih tinggi. Indonesia bertujuan untuk mencapai SDG 8 dan menjamin pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warganya melalui pemantauan dan perbaikan. Selain itu, diantisipasi bahwa upaya yang lebih efisien akan dilakukan untuk mencapai SDG 8 dan meningkatkan standar hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesejahteraan ekonomi dan tenaga kerja disorot oleh sejumlah indikator yang melacak kemajuan menuju SDG 8, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Indikator-indikator tersebut meliputi tingkat pengangguran, proporsi pekerjaan yang dilakukan secara informal, upah layak, dan jaminan sosial pekerja. Faktor-faktor lain termasuk akses penduduk terhadap layanan keuangan yang adil, pelatihan dan pendidikan berkualitas tinggi, teknologi informasi dan komunikasi, produktivitas tenaga kerja, dan praktik bisnis yang berkelanjutan di perusahaan. Tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sangat mengkhawatirkan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan tingkat pengangguran mencapai puncaknya pada semester kedua, dengan 9,7 juta orang menganggur - sekitar 7,07 persen dari populasi usia kerja - pada tahun tersebut. Jumlah tersebut kemudian menurun menjadi 8,7 juta pada semester pertama 2021 dan meningkat menjadi 9,1 juta pada semester kedua. Kemudian, 8,4 juta orang tinggal di sana pada semester pertama tahun 2022. Lulusan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan menyumbang porsi terbesar dari tingkat pengangguran pada semester pertama tahun 2022 (BPS 2022, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Februari 2022, terdapat 144,01 juta orang Indonesia yang bekerja. Angka ini menyumbang 69,06 persen dari 208,54 juta orang usia kerja. Sebanyak 135,61 juta orang bekerja pada Februari 2022, menurut data BPS. Sektor pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja, atau 29,96 persen. Sebanyak 19,03 persen diserap oleh sektor perdagangan, 13,77 persen diserap oleh sektor industri, 7,11 persen diserap oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 6,04 persen diserap oleh sektor bangunan. Sektor-sektor yang menyerap persentase terbesar dari penduduk yang bekerja adalah jasa pendidikan (4,89 persen), jasa lainnya (4,34 persen), transportasi dan pergudangan (4,21 persen), administrasi pemerintahan (3,42 persen), jasa kesehatan (1,76 persen), jasa perusahaan (1,43 persen), pertambangan (1,17 persen), dan jasa keuangan (1,11

persen). Sektor yang menyerap paling sedikit persentase penduduk yang bekerja adalah pengadaan listrik dan gas (0,23 persen) (BPS 2022, 2022).

Seiring berjalannya waktu, peningkatan zakat di Indonesia memiliki kecenderungan yang baik. Kenaikan tahunan dalam perolehan zakat dan jumlah Badan Amil Zakat menandakan ekspansi zakat yang konsisten. Selain itu, telah terjadi peningkatan yang stabil dalam hal kekayaan dan kualitas layanan dari sistem distribusi zakat wajib. Posisi zakat sama pentingnya dengan pajak pendapatan negara karena peningkatannya yang sangat besar, yang menjadikannya senjata untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (El-Jizya, 2019).



Gambar 5. Pengumpulan ZIS 2002-2022

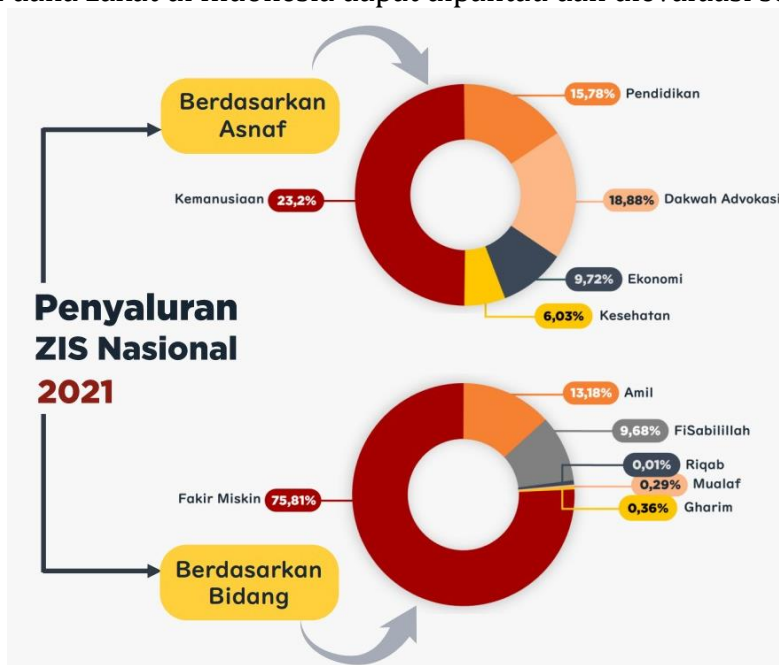
Sumber: (BAZNAS, 2023)

Pengumpulan dana ZIS yang terus naik merupakan bukti pertumbuhan zakat menunjukkan tren positif, meskipun pada pengelolaan zakat di Indonesia masih belum optimal. Terdapat kesenjangan yang besar antara potensi nilai zakat dan realisasi dana zakat. Realisasi pendistribusian zakat masih dalam kisaran 0,2 - 1%, dan terdapat banyak mustahik yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (Cholidi & Zuraidah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik belum terlalu terlihat. Pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir juga dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat (Afwan & Andri, 2022). Dengan demikian, sementara pertumbuhan zakat di Indonesia menunjukkan tren positif, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat di Indonesia yaitu seperti pengelolaan zakat yang belum optimal di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat. Dana zakat belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia dianggap penting agar tepat sasaran dan mengambil peranan signifikan dalam menyejahterakan rakyat (Nilawati & Rijal, 2020). Preferensi masyarakat Indonesia untuk mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga non-pemerintah seperti masjid, musholla, dan lembaga sosial lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar zakat tidak tercatat secara resmi, yang dapat memengaruhi realisasi dana zakat (Cholidi & Zuraidah, 2018). Dari pemaparan sebelumnya terlihat bahwa integrasi zakat, optimalisasi pengelolaan zakat, serta preferensi pembayaran zakat masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dana zakat di Indonesia.

Pengukuran pertumbuhan dana zakat di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa metode dan indikator, seperti yang dijelaskan dalam beberapa penelitian, pertumbuhan dana zakat juga dapat diukur dari efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Penggunaan teknologi mutakhir, seperti teknologi big data, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran (Nilawati & Rijal, 2020). Potensi pembayaran zakat secara online dan offline, pengukuran pertumbuhan dana zakat juga dapat melibatkan analisis potensi pembayaran zakat secara online dan offline, serta realisasi dana zakat. Pertumbuhan zakat dapat tercermin dari efektivitas dan efisiensi pembayaran zakat secara online, serta peningkatan realisasi dana zakat dari tahun ke tahun (Afwan & Andri, 2022).

Pengukuran pertumbuhan dana zakat di Indonesia dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari integrasi zakat, optimalisasi pengelolaan zakat, hingga potensi pembayaran zakat secara online dan offline. Dengan pendekatan yang komprehensif, pertumbuhan dana zakat di Indonesia dapat dipantau dan dievaluasi secara holistik.



Gambar 6. Penyaluran ZIS Nasional 2021

Sumber: (BAZNAS, 2023)

Pendistribusian ZIS nasional di Indonesia sebanyak 9.72% dalam membantu permasalahan ekonomi dan 75,81% fakir miskin, terdapat kesenjangan besar antara potensi nilai zakat dan realisasinya (Cholidi & Zuraidah, 2018). Pola dan teknis baru pendistribusian zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis, pendistribusian zakat di Indonesia menjadi topik penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan prinsip-prinsip zakat.

Meskipun ada beberapa sistem distribusi zakat yang digunakan secara luas di Indonesia, salah satu yang paling signifikan adalah distribusi zakat melalui lembaga amil zakat (LAZ). Zakat harus dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan hukum Islam, dan hal ini merupakan tanggung jawab LAZ. Selain itu, LAZ berkontribusi pada pendistribusian zakat yang tepat dan efektif kepada mereka yang membutuhkan (Lutfi, 2023). Salah satu cara untuk menekankan

pentingnya menyalurkan zakat sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan bahwa zakat didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan adalah dengan mendasarkan pendistribusian zakat pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis (Nilawati & Rijal, 2020).

Pendistribusian zakat di sektor pendidikan: Zakat tidak hanya diberikan kepada mustahik yang membutuhkan, tetapi juga disalurkan di sektor pendidikan. Pendapatan zakat dapat digunakan untuk membiayai program pembiayaan pendidikan dengan menyalurkan bantuan infrastruktur ke lembaga pendidikan yang membutuhkan, serta beasiswa untuk dhuafa yang tidak mampu membayar uang sekolah (Rohmatullah, 2022). Diperkirakan bahwa zakat akan berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai saluran distribusi ini.

Potensi zakat di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia sangat erat kaitannya dengan ekonomi lokal. Banyak penelitian yang membahas berbagai aspek potensi zakat dan pengelolaannya dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan individu. Kapasitas zakat untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut ditunjukkan oleh Indonesia, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki efek langsung yang dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah sekitarnya (Hadi, 2021). Realisasi pembayaran zakat di Indonesia menunjukkan efektivitas dan efisiensi digitalisasi pembayaran zakat secara online. Pembayaran zakat terus berkembang menjadi dua metode pembayaran: online dan offline. Akan tetapi, realisasi pembayaran zakat masih jauh di bawah nilai potensi zakat (Afif & Oktadi, 2018).

Pentingnya menyederhanakan administrasi zakat di Indonesia, terutama dengan menggunakan teknologi mutakhir seperti big data. Integrasi big data dan manajemen zakat diantisipasi untuk mempermudah pengumpulan, analisis, dan analisis data dalam jumlah besar secara real time dari berbagai sumber (Afwan & Andri, 2022). Hal ini dapat mengoptimalkan kontribusi zakat terhadap inisiatif pengentasan kemiskinan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Namun, penelitian ini juga memberikan banyak penekanan pada fungsi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). KJKS membantu masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan akses keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini diharapkan dapat mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (Wahyudi, 2017).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan banyak program untuk memaksimalkan potensi zakat di negara ini. Salah satu program tersebut adalah Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang mencoba memberikan informasi dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat untuk memulai usaha mereka sendiri. Para peserta dalam program ini mendapatkan pelatihan dalam berbagai profesi, termasuk menjahit, tata rias, membuat kue, dan servis AC. Selain itu, program ini juga membangun hubungan antara wirausahawan mandiri dan bisnis yang membutuhkan barang atau jasa tertentu. Selain itu, bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana bisnis, program ini dapat memberikan dukungan keuangan dalam bentuk hibah atau pinjaman berbunga rendah untuk modal perusahaan (Rahayu & Firman, 2023).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan teknologi big data untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat adalah salah satu cara untuk melakukan hal ini (Afwan & Andri, 2022). Memperkuat Eksistensi Kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ): Dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program untuk memperkuat keberadaan kelembagaan BAZ. Dalam rangka memberikan upaya pengelolaan zakat untuk mendukung pencapaian angka potensi zakat saat ini, program ini bertujuan untuk menganalisis pola pengelolaan BAZ, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, serta pengawasan pengelolaan zakat yang telah dilakukan (Hadi, 2021). Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan (Ali et al., 2016). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat antara lain pemberian dana zakat yang masih bersifat bantuan temporer, pengelolaan yang belum terorganisir dengan baik, penyaluran dana zakat untuk program produktif yang masih terbatas, dan kurangnya kajian dan pengawasan yang komprehensif terhadap lembaga amil zakat (LAZ) (Rohmatullah, 2022). Meskipun demikian, zakat memiliki potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan jika dikelola secara efektif dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti teknologi big data.

Selain itu, peran koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) juga dapat membantu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. KJKS membantu akses permodalan di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi (Riyanti et al., 2020). Dalam konteks ini, dana zakat produktif juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat (Afif & Oktiadi, 2018). Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efektif dan pemberdayaan ekonomi melalui berbagai lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud dengan mengoptimalkan dana zakat melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah melalui pengelolaan yang terintegrasi, di mana dana zakat dikelola secara holistik dengan memanfaatkan teknologi big data. Pemanfaatan big data dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga memungkinkan penyaluran dana zakat yang lebih tepat sasaran dan efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Riyanti et al., 2020). Dengan menyediakan akses permodalan, KJKS menyasar masyarakat menengah ke bawah, sebuah langkah yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu, distribusi dana zakat juga dapat diutamakan untuk investasi di bidang pendidikan. Pendanaan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan trikarya ini pengelolaan terintegrasi, pemberdayaan ekonomi melalui KJKS, dan investasi dalam pendidikan

optimis bahwa kontribusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia akan semakin signifikan (Riyadi, 2019).

Dalam penyediaan lapangan kerja, produk zakat dapat memberikan kesempatan kerja bagi fresh graduate dan masyarakat umum melalui berbagai program yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha sendiri. Produk zakat produktif yang telah disalurkan oleh lembaga amal zakat (LAZ) memiliki peran dalam pengembangan pendapatan mustahik, seperti Pemberdayaan Usaha Mikro (PUMI), Kampung Ternak Mandiri, dan Gerobak Tangguh (Rohmatullah, 2022). Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan perluasan kesempatan kerja bagi para lulusan baru di masa pandemi Covid-19, seperti melalui program Tenaga Kerja Mandiri yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha mereka sendiri (Hadi, 2021). Dengan demikian, produk zakat dan program pemerintah dapat berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi para fresh graduate dan masyarakat umum.

5. Simpulan

Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Zakat berperan penting dan cukup efektif dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyedeikan pelatihan, memberikan banyak fasilitas agar angka kemiskinan semakin berkurang dari tiap tahunnya dengan mengolah zakat yang ada dengan manajemen yang tepat maka akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas hingga dapat menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, hal tersebut dibuktikan dengan naiknya ekonomi pada tahun 2023 sebesar 4,94% dan angka kemiskinan berkurang 1,74%.

Saran

Penelitian ini hanya membahas mengenai potensi zakat sebagai katalistator pencapaian pembangunan berkelanjutan SDGs dengan mengurangi angka kemiskinan dan menyetarakan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu dua dari tujubelas tujuan SDGs dengan menggunakan pendanaan zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan amal zakat yang ada, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan membahas mengenai efisiensi zakat pendanaan dalam program pembangunan berkelanjutan SDGs.

6. Daftar Pustaka

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>
- Afwan, M. M., & Andri. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Penerapan Teknologi Mutakhir. *Jurnal An-Nahl*, 9(2), 72–79. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.56>
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
- Azzahro, I. K., & Prakoso, J. A. (2022). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di

- Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 314–327. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.104>
- Bambang Hermantoro, & Zuraidah. (2023). Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Di Kota Kediri. *Istithmar*, 7(1), 42–49. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.606>
- Bilek-Steindl, S., & Url, T. (2022). Nowcasting and monitoring SDG 8. In *Empirica* (Vol. 49, Issue 2). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10663-022-09533-0>
- BPS 2022. (2022). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, 19(27), 1–5.
- Cholidi, C., & Zuraidah, Z. (2018). Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia. *Intizar*, 24(2), 25–32. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2843>
- El-Jizya, E. (2019). Retracted: INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 27–58. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2945>
- Hadi, N. S. (2021). MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT TINJAUAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development Goals). *IndraTech*, 2(1), 38–50. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.46>
- Jurnal, A., & Islam, E. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. (2018). Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Coordination, Planning, Monitoring, Evaluation, and Reporting on the Implementation of the Sustainable Development Goals). *Kementerian PPN/Bappenas*, 1.308.
- Khorunisa, I., & Prasajo. (2020). The Effect of Education, Health, Unemployment and Distribution of Zakat To Poverty in Yogyakarta. *I-Economic: A Research Journal* ..., 6(2), 121–136. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/6229>
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–41. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513>
- Nilawati, N., & Rijal, K. (2020). Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(2), 116–131. <https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i2.3535>
- Rahayu, E. L., & Firman, F. (2023). *Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Wilayah Jakarta Utara*. 4, 25–45.
- Riyadi, S. (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 121. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>
- Riyanti, D., Iskandar Ali Alam, & Defrizal. (2020). Jurnal Manajemen Diversifikasi Jurnal Manajemen Diversifikasi. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 1–11.

- Rohmatullah, A. (2022). Analysis of the Performance Efficiency of Zakat Management Institutions Using Data Envelopment Analysis: Study at LAZ Harfa Banten 2017-2020. *Fara'id and Wealth Management*, 2(2).
<https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.191>
- Wahyudi, J. (2017). Kontribusi Koperasi dalam Upaya Pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati). *URECOL ; Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, Dan Agama*, 9-16.
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/708>